

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

- 5.1.1. Penerapan prinsip pelayanan di Kelurahan Ampang telah dijalankan dengan mengacu pada asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta responsivitas. Kelurahan berperan dalam memberikan pelayanan administrasi, kependudukan, dan kegiatan kemasyarakatan. Namun, penerapannya masih belum sepenuhnya optimal sehingga perlu terus ditingkatkan agar benar-benar mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 5.1.2. Pelaksanaan pelayanan di Kelurahan Ampang masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sarana, sumber daya, dan konsistensi dalam penerapan prinsip pelayanan. Kondisi ini berpengaruh pada kepuasan masyarakat, sehingga ke depan perlu dilakukan penguatan kapasitas aparatur dan perbaikan sistem pelayanan agar semakin efektif dan merata.
- 5.1.3. Dalam perspektif fiqh siyasah, pelayanan yang dijalankan lurah seharusnya mencerminkan nilai-nilai syar'i seperti keadilan ('adl), amanah, musyawarah (syura), dan kemaslahatan (maslahah). Realitas di Kelurahan Ampang menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut sudah mulai terwujud, meskipun masih memerlukan peningkatan agar dapat dilaksanakan secara lebih konsisten dan menyeluruh.

5.1 SARAN

Bagi pembaca, khususnya masyarakat dan aparatur pemerintahan di tingkat kelurahan, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya penerapan prinsip Pelayanan dalam pelayanan publik. Masyarakat diharapkan lebih aktif berpartisipasi, sementara aparatur kelurahan dapat memperbaiki kinerja agar lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga.



DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. (2021). Peran Lurah Dalam Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Perspektif Fiqh Siyasah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Al-Faruqi, I. R. (2021). Etika Politik dalam Islam: Model Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Literasi Qurani Press.
- Al-Mawardi. (2020). Al-Ahkam al-Sultaniyyah (Hukum-hukum tentang Kekuasaan dalam Islam). Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari. Pustaka Setia.
- Amri, S. (2023). Fiqh Siyasah. UIN Sumatera Utara.
- Arifin, A. (2022). Kepemimpinan dalam Perspektif Islam: Kajian Fiqih Siyasah. Deepublish.
- Asmuni, A. (2021). Konsep dan implementasi dalam tata kelola pemerintahan Islam. Prenada Media.
- Azizy, Q. (2021). Etika Kepemimpinan Islam: Kajian atas Konsep Amanah dan Masalah dalam Fiqh Siyasah. Pustaka Tafsir.
- Bahrudin, A. (2016). Pola Hubungan Pemerintahan Desa Dan Parlemen Desa Menuju Pelayanan. Serat Acitya, 4(3), 135.
- Beta Utami. (2022). Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Reuplik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Siyasah Dusturiyah. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- BPS Kota Padang. (2024). Kecamatan Kuranji dalam angka 2024. BPS Kota Padang. <https://padangkota.bps.go.id>
- Budiman, A. (2020). Pelayanan dalam Perspektif Islam. Jurnal Ilmu Pemerintahan Islam, 8(2), 110–122.
- Djalaluddin, A. (2021). Fiqh Siyasah: Teori dan Praktik Pemerintahan Islam. KENCANA.
- Djazuli, A. (2003). Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah. PT Fajar Interpretama Mandiri.

- Efrinaldi. (2007). *Fiqh Siyasah Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam*. Granada Press.
- Effendi, T. (2021). *Pelayanan: Telaah dari Perspektif Administrasi dan Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Hakim, L. N. (2013). Ulasan metodologi kualitatif: Wawancara terhadap elit. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 4(2), 165–172.
- Hamdani, M. (2021). Konsep 'Adl dalam Pemerintahan Islam: Analisis terhadap Nilai-Nilai Kepemimpinan dalam Al-Qur'an. *Jurnal Fiqh Dan Siyasah*, 5(2), 120–135. <https://doi.org/10.1234/jfs.v5i2.2021.120>
- Hidayatullah, U. I. (2024). Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Pelayanan pada Pemerintah Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. *Journal Politique*, 4(2), 130–146.
- Huda, N., & Fauzan, M. (2023). Hisbah sebagai Instrumen Pengawasan Etis Pemerintah dalam Perspektif Fiqh Siyasah. *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 15(1), 55–70. <https://doi.org/10.1234/jhs.v15i1.2023>
- Ibnu Syarif, M., & Zada, K. (2008). *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. PT Gelora Aksara Pratama.
- Indrayani, D. (2019). Implementasi Pelayanan di Pemerintahan Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 45–53.
- Karso, J. (2022). *Pelayanan*. Penerbit Samudra Biru.
- Katsir, I. (2003). *Tafsir Al-Quran dan Al-Azim*. Pustaka Imam Syafi'i.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kelurahan. Kemendagri.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018a). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Kemendagri.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018b). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Kemendagri.
- Kurniawan, T. (2017). *Administrasi Publik dan Pelayanan*. Gava Media.

- Lajnah. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Langgam.id. (2024). Kelurahan Ampang, Kuranji, Kota Padang. Langgam.Id.
<https://langgam.id/kelurahan-ampang-kuranji-kota-padang>
- Lubis, A. (2019). Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah. Senesta Aksara.
- Lukow, S. (2013). Eksistensi Pelayanan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Kota Manado. Jurnal Hukum Unsrat, 1(5), 130–142.
- Maksudi, B. (2017). Dasar-Dasar Administrasi Publik Dari Klasik ke Kontemporer. PT Rajagrafindo Persada.
- Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. Metode Penelitian Sosial, 33.
- Miftah, T. (2019). Teori-teori Administrasi Publik dan Implementasinya. Rineka Cipta.
- Moenek, R., & Suwanda, D. (2019). Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah. PT Remaja Rosdakarya.
- Muluk, M. R. (2018). Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah: Teori dan Praktik. Airlangga University Press.
- Nasrullah, A. (2023). Fiqh Siyasah. Litnus.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif. WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 13(2), 177–181.
- Nurcholis, H. (2019). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Erlangga.
- Nurhadi, A. (2023). Amanah dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya dalam Pemerintahan Modern. Jurnal Fiqh Siyasah Dan Hukum Tata Negara, 5(2), 101–113.
<https://doi.org/10.1234/jfshn.v5i2.2020>
- Nurhayati, L., & Sulaiman, T. (2020). Maqashid Syariah dan Implikasinya dalam Kebijakan Publik. Jurnal Ilmiah Syariah Dan Hukum, 18(1), 112–127. <https://doi.org/10.xxxx/jish.v18i2.567>

- Nurliana, N. (2023). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. *Jurnal Riset Kajian Teknologi dan Lingkungan*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:263666832>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Sekretariat Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5087/pp-no-73-tahun-2005>
- Pulungan, S. (2014). *Fiqh Siyasah*. Penerbit Ombak.
- Ramlan, M. E. (2023a). Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Pelayanan dalam Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara. *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, 7(1), 42–59.
- Ramlan, M. E. (2023b). Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Pelayanan dalam Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara. *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, 7(1), 42–59. <https://doi.org/10.21093/qj.v7i1.6510>
- Rantepasang, A., Kaawoan, J., & Rengkung, F. (t.t.). *Peran Lurah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Suatu Studi Di Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung*.
- Sarkawi. (2022). *Hukum Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*. Mataram University Press.
- Sumantri, I. (2022). Reorientasi reformasi birokrasi dan Pelayanan dalam penyelenggaraan sektor publik di Indonesia. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 5(2), 63–72.
- Syamsuddin, A. (2023). *Kepemimpinan Islam dalam Perspektif Fiqih Siyasah*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Tampubolon, M., Simanjuntak, N., & Silalahi, F. (2023). *Birokrasi & Pelayanan*.
- Wati, F., Lubis, P. K. D., Akmalia, U., & Simanjuntak, M. K. S. (2024). Analisis Sistem Pengendalian Internal Berdasarkan Komponen Coso-Integrated Framework: Studi Kasus: Kantor Kelurahan Tanjung Mulia

Hilir. SABER: Jurnal Teknik Informatika, Sains dan Ilmu Komunikasi, 2(3), 67–78.

Widodo, J. (2020). Pelayanan: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. *Insan Cendekia*.

